

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MITIGASI PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN BOYOLALI

Herlambang Adi Yudha

NPP. 29.1545

Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : herlambangadiyudha@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The researcher focuses on the high industrialization that occurs in Boyolali Regency which has the potential to cause water environmental pollution, especially in the Bengawan Solo River Basin in Boyolali Regency, Central Java Province because not all industries have AMDAL permits, lack of supervision of industrial business actors, both large and small industries. , as well as the government's lack of firmness in dealing with business actors who are proven to have violated the rules, which can disrupt the security and safety of the community. **Purpose:** This study aims to determine, analyze, and examine how the performance of the Environmental Service in Mitigation of Industrial Waste Pollution in Boyolali Regency, Central Java Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach with data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. **Results:** In this study the authors found that the performance of the Environmental Service of Boyolali Regency was considered optimal and overall was quite good. The community also actively participates in mitigating waste pollution and nature conservation. However, there are still some obstacles, such as the lack of personnel from the Boyolali Regency Environmental Service and the budget that should be optimized for the ongoing program by the Environmental Service in an effort to mitigate environmental pollution by industrial waste, as well as the lack of public awareness of the potential for waste pollution in the environment. The Environmental Service's efforts to improve its performance include conducting several programs in Mitigation of industrial waste pollution, namely by programs, Monitoring Liquid Waste from Activities / Businesses, Installation and Operation of Livestock Biogas WWTPs, Climate Village Development, Development of Biopori Infiltration Wells, Provision of Case Complaints Facilities. Environment, Community Involvement in Environmental Management, Network Development in Environmental Management. **Conclusion:** The performance of the Environmental Service of Boyolali Regency is quite good, although with some existing obstacles. Mitigation of environmental pollution is the obligation of all parties and there is a need for collective awareness in its implementation so that the impact can be minimized. Therefore, in addition to improving the performance of the Environmental Service, it is also necessary to increase public awareness and active participation in order to minimize the impact of disasters that can occur.

Keywords: DLH, Performance, Industrial Waste, Mitigation, Pollution.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada tingginya industrialisasi yang terjadi di Kabupaten Boyolali yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan khususnya terutama di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan belum semua industri memiliki izin AMDAL, kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha industri baik industri besar maupun kecil, serta kurang tegasnya pemerintah dalam menangani pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan, yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mitigasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dirasa sudah optimal serta secara keseluruhan sudah cukup baik. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam Mitigasi pencemaran limbah serta kelestarian alam. Namun masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali serta anggaran yang seharusnya dapat di optimalkan kepada program yang sedang bebrlangsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya Mitigasi pencemaran lingkungan oleh limbah industri, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pencemaran limbah di lingkungannya. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan melakukan beberapa program dalam Mitigasi pencemaran limbah industri yaitu dengan program, Monitoring Limbah Cair dari Kegiatan / Usaha, Instalasi dan Pengoperasian IPAL Biogas Ternak, Pengembangan Kampung Iklim , Pembangunan Sumur Resapan Biopori, Penyediaan Sarana Pengaduan Kasus Lingkungan, Pelibatan Komunitas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Kesimpulan:** Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sudah cukup baik, walaupun dengan beberapa hambatan yang ada. Mitigasi pencemaran lingkungan merupakan kewajiban semua pihak dan perlu adanya kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya sehingga dampak yang terjadi dapat lebih diminimalisir. Oleh sebab itu, selain peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup perlu juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi.

Kata Kunci: DLH, Kinerja, Limbah Industri, Mitigasi, Pencemaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dalam bidang industri dewasa ini sangat berkembang pesat. Industri yang memiliki peranan penting sebagai tempat produksi pengolahan bahan mentah menjadi bahan yang siap pakai demi memenuhi kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan sekunder serta tersier manusia, memang sangat dirasakan dampaknya. Berbagai negara di belahan dunia saling berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam bidang industri untuk berusaha meningkatkan pendapatan perkapita di negaranya masing-masing melalui bidang industri. Akan tetapi di lain sisi, industrialisasi membawa pengaruh negatif, khususnya jika dilihat dari pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996:195-196).

Boyolali yang termasuk kedalam bagian Solo Raya terletak pada kawasan strategis agropolitan Semarbojong (Semarang-Boyolali-Magelang) dan terletak diantara segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) ditambah lagi dengan adanya program strategis nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Boyolali seperti pembangunan moda transportasi jalan tol dan jalur kereta api, bahkan akan ada perluasan Bandar Udara Adisumarmo yang membuat industrialisasi terjadi secara besar-besaran, hal inilah yang membuat semakin besarnya pertumbuhan jumlah industri di kabupaten Boyolali.

Boyolali yang dikenal sebagai kota susu atau kota sapi yang identik dengan aktivitas peternakan yang sangat berkembang kini sangat dipengaruhi oleh masuknya perkembangan dunia industri. Dengan adanya kebijakan Bupati Boyolali mengenai “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera” dan didukungnya oleh program One Stop Service (OSS) membuat peningkatan kemudahan segala layanan dan perizinan investasi, ditambah lagi pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan izin dan akses kepada pelaku usaha untuk membuka usahanya terutama pada sektor industri.

Industri yang masuk ke Kabupaten Boyolali sangatlah beraneka ragam, mulai dari industri yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi sampai industri yang melakukan pengolahan menjadi bahan jadi. Terdapat juga Industri besar di Kabupaten Boyolali yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan didominasi oleh industri tekstil dan pakaian jadi (Garmen) ,sedangkan industri menengah dan kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan di Kabupaten Boyolali didominasi oleh industri tekstil, pengolahan tahu dan peternakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kemajuan perkembangan di bidang Industri pada kenyataannya berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan. Limbah industri yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat tidak baik dikarenakan kandungan yang ada di dalamnya, hal tersebut berdampak negatif apabila langsung dibuang mentah ke lingkungan begitu saja tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang menjadi sumber air untuk menghidupi masyarakat sekitaran sungai Bengawan Solo. Namun kini kondisi sungai tersebut begitu memburuk. Pencemaran limbah terutama limbah industri yang menjadi penyebab utama Sungai Bengawan Solo menjadi tercemar. Puncaknya terjadi pada musim kemarau lalu yang membuat kondisi baku mutu air sungai Bengawan Solo menjadi tidak layak konsumsi dikarenakan kondisinya yang telah berubah warna menjadi coklat kehitaman. Kadar limbah yang terdapat pada sungai tersebut pada musim kemarau lalu dapat dikatakan tercemar dengan ditandai meningkatnya kadar pencemar dalam sungai mencapai 40-200 persen, yang membuat PDAM menghentikan pengolahan air dari sungai tersebut.

Di Kabupaten Boyolali dilalui anak sungai Bengawan Solo yaitu sungai Pepe yang dimana Peruntukan dan Pengelolaan kualitas air sungai Pepe secara teknis diatur oleh Peraturan Gubernur No 98 Tahun 2018. Sungai Pepe mengalir KPI yaitu kecamatan Ngemplak yang didominasi oleh industri pabrik tahu di Desa Gagaksipat dan peternakan di Desa sawahan. Kawasan tersebut menjadi salah satu indikasi dari pencemaran Sungai Bengawan Solo melalui anak sungai Pepe di Kabupaten Boyolali.

Lingkungan yang tercemar oleh limbah industri selain dapat menimbulkan efek bencana alam juga dapat menimbulkan bencana sosial seperti contoh masyarakat yang tidak terima sumber airnya tercemar oleh limbah akan melakukan protes ataupun demo kepada perusahaan industri dan efek terburuknya dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Dampak negatif lain seperti gangguan kesehatan masyarakat, kinerja produksi perikanan menurun, eutrofikasi, penurunan perikanan darat, dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya dilapangan ada banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar dalam pengolahan limbah hasil kegiatan industri. Banyak dari pelaku usaha Industri yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau izin lain tentang dokumen lingkungan hidup ataupun sudah memiliki izin namun saat uji standar baku mutu limbah di lapangan tidak memenuhi persyaratan. Hal ini sangat membahayakan, apabila dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan resiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan limbah industri sebagai mitigasi pencemaran lingkungan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti membuat daftar hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Dengan ini, tingkat keaslian serta lokasi penelitian yang akan dilakukan dapat diperkirakan. Penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini antara lain:

Jurnal dari Gusti, Alim Surya, Rizky Rahadian Wicaksono, Eko Sulistiono (2021) yang berjudul Analisis Kualitas Air Sungai Bengawan Solo Akibat Pembuangan Limbah Industri Tahu dan Tempe di Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Yang mendeskripsikan hasil dari pengukuran sampel kualitas air sungai dari limbah secara fisika, kimia, biologi didapatkan 90% air kondisi tercemar yang meliputi bau dan rasa yang tidak memenuhi standar baku mutu berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017.

Skripsi dari Pratiwi, Qodri Putri (2015) Fakultas Pendidikan IPS Universitas Sebelas Maret, yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Cair Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar). Yang mendeskripsikan Pelaksanaan Perda kabupaten Karanganyar No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah cair di Desa Kemiri yang dilakukan oleh BLH, DPRD, Bagian Hukum Setda, Satpol PP, serta pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi warga dalam kesehatan lingkungan, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Perda belum mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi implementasi Perda yaitu : Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan, Keterbatasan SDM bagian pengawasan, Terbatasnya sarana di lapangan untuk pengawasan, Kurangnya ketaatan pelaku usaha pada undang – undang, Tingginya biaya operasional penanganan limbah, Kurangnya partisipasi masyarakat, Kurangnya tenaga ahli laboratorium, serta Kebutuhan daerah terhadap Perda.

Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan pada kedua penelitian tersebut. Persamaan antara penelitian pertama dan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji perihal kualitas lingkungan terutama air

sungai Bengawan Solo yang memburuk yang diakibatkan oleh pengaruh limbah industri. Kesamaan antara penelitian kedua dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perihal pentingnya pengelolaan limbah cair sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat. Perbedaan penelitian pertama dan penelitian ini ialah perbedaan pembahasan, penelitian pertama lebih fokus pada pengukuran kualitas air di Bengawan Solo, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada program kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mitigasi pencemaran limbah industri. Perbedaan penelitian kedua dan penelitian ini ialah penelitian pertama berfokus pada implementasi perda tentang pengelolaan limbah cair, sebaliknya penelitian ini berfokus di program pemerintah daerah oleh instansi pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan limbah cair industri.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana dalam penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi menurut Mohammad Mahsun (2016) yang terdiri dari 6 dimensi yaitu *Input, Process, Output, Outcome, Benefit*, dan *Impact*. Konteks penelitian yang dilakukan yaitu Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mitigasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Boyolali, variabel yang digunakan yaitu berbeda dengan variabel pada penelitian Gusti, Alim Surya, Rizky Rahadian Wicaksono, Eko Sulistiono serta Qodri Putri Praiwi. Selain itu Perbedaan juga terletak pada konsep, lokasi, fokus penelitian, dan ruang lingkup

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mitigasi Pencemaran Limbah Industri Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti mengenakan pendekatan kualitatif karena permasalahannya berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya bergantung pada observasi. Sugiyono, (2012) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ialah studi perihal seseorang, perilaku, cerita, tetapi juga peran organisasi, gerakan sosial ataupun hubungan timbal balik.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup, Fungsional Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan, serta 2 Ketua Kelompok UMKM. Adapun analisisnya menggunakan Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang

menyebutkan bahwa kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan secara terintegrasi dan terjadi secara kontinuitas dan berkesinambungan yang meliputi pengolahan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Mitigasi Pencemaran Limbah Industri di Kabupaten Boyolali menggunakan teori kinerja organisasi menurut Mohammad Mahsun (2016) yang terdiri dari 6 dimensi yaitu *Input*, *Process*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. *Input* / Masukan

- **Kebijakan Pemerintah**

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tentang lingkungan hidup terutama masalah limbah industri yang sangat mengganggu kondisi lingkungan maupun masyarakat apabila dibiarkan terus menerus yang akan mengakibatkan dampak semakin besar, Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali telah melakukan berbagai upaya regulasi dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan baik melalui perizinan, penetapan baku mutu limbah, hingga sanksi bagi yang melanggar.

- **Sumber Daya Manusia**

Personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sejumlah 241 orang terdiri dari 107 orang berstatus ASN dan 134 orang berstatus tenaga harian lepas (THL). Jumlah personil berstatus THL lebih banyak karena kebutuhan akan pegawai semakin meningkat seiring semakin kompleksnya tugas dan fungsi dinas sementara masih berlaku moratorium penerimaan ASN dan banyaknya ASN yang purna tugas. 134 THL ditugasi membantu administrasi kegiatan, tenaga kebersihan, pengemudi, petugas kebun raya, termasuk petugas persampahan.

- **Anggaran yang Tersedia**

DLH kabupaten Boyolali merupakan OPD Tipe A dengan jumlah pelaksana tugas sebanyak 241 orang, 107 orang ASN dan 134 orang tenaga harian lepas. Total anggaran DLH Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Rp. 28.639.040.000,- atau 1,20% dari APBD. Belanja langsung sebesar Rp. 19.419.788.000,- atau 2,25% dari total belanja langsung Kabupaten Boyolali.

3.2. *Process* / Proses

- **Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hingga saat ini masih dijumpai pelaku usaha yang tidak/belum melaksanakan kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Berdasarkan pencatatan kegiatan usaha penghasil air limbah di Kabupaten Boyolali, ditemukan bahwa terdapat total 99 kegiatan usaha penghasil air limbah. Namun, ditemukan pula terdapat total 39 pelaku usaha/industri yang menghasilkan air limbah dan belum mengelola air limbahnya. Beberapa contoh kegiatan usaha yang belum menerapkan pengelolaan air limbah ini adalah perusahaan peternakan ayam pedaging, pelayanan kesehatan, industri keramik dan porselen, industri rokok, industri kertas, garment, hotel, dan industri arang.

- **Kerja Sama dalam Pelaksanaan Program**

Dalam melaksanakan program pemerintah di bidang penanganan dan pengelolaan limbah cair industri, Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan penanganan dan pengelolaan limbah cair industri. Adapun kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan, serta TNI dan POLRI serta dibantu oleh sukarelawan

- **Penggunaan Waktu**

Dalam menjalankan program kerja pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dibutuhkan penggunaan waktu yang efektif dalam menjalankan berbagai program pemerintah agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali memiliki 4 isu prioritas lingkungan hidup daerah yaitu, Persampahan, Penurunan ketersediaan air, Pencemaran Air, dan Penurunan Kualitas Lahan. Dalam menjalankan isu prioritas lingkungan hidup daerah tersebut dalam jangka waktu 5 tahun haruslah bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan 4 isu prioritas lingkungan hidup kabupaten boyolali yang ditetapkan langsung oleh bapak Bupati boyolali Mohammad Said Hidayat, S.H telah berlangsung selama 2 tahun kerja dan dinilai sudah cukup efektif.

3.3. Output / Keluaran

- **Peningkatan Kinerja Organisasi**

Peningkatan kinerja organisasi penting adanya sebab sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dari suatu dinas dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Peningkatan merupakan suatu indikator dari bentuk keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi. Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting, maka dari itu dibutuhkan peningkatan kinerja agar Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan cara memanfaatkan seefektif mungkin sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, serta kebijakan ataupun program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.

3.4. Outcome / Hasil

- **Masalah Limbah Dapat Teratasi Serta Stabilnya Kondisi Lingkungan**

Dengan memerhatikan program kerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah berjalan sekitar 2 tahun yang dipimpin oleh ibu Ir. Lusya Dyah Suciati, terdapat beberapa program yang telah berhasil dilakukan dalam mengatasi permasalahan limbah yaitu, Monitoring Limbah Cair dari Kegiatan / Usaha, Instalasi dan Pengoperasian IPAL Biogas Ternak, Pengembangan Kampung Iklim, Pembangunan Sumur Resapan Biopori, Penyediaan Sarana Pengaduan Kasus Lingkungan, Pelibatan Komunitas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dahulu pada saat UU Cipta Kerja Omnibuslaw diberlakukan tepatnya pada awal tahun 2020, banyak sekali industri yang berdiri di Kabupaten Boyolali dan pada saat itu cukup banyak aduan dari masyarakat yang merasa terganggu terhadap adanya aktivitas industri terutama pada permasalahan limbahnya, dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kepentingan perkebunan dan persawahan maupun kepentingan

pribadi. Namun seiring 2 tahun berjalan ini setelah beberapa program berhasil dilaksanakan hampir tidak ada aduan dari masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

3.5. *Benefit / Manfaat*

- **Terhindar dari Pencemaran Lingkungan serta Terjaganya Wilayah Perairan Sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah**

Berdasarkan hasil analisis kualitas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Boyolali terhadap 7 (tujuh) parameter yaitu TSS, COD, BOD, DO, fosfat, fecal coli, dan total coliform digunakan sebagai dasar penentuan Indeks Kualitas Air (IKA), dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air untuk mendapatkan informasi tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Hasil analisis status mutu air sungai menyatakan bahwa dari 7 titik pengambilan sampel air sungai, 3 titik pemantauan dinyatakan memenuhi, dan 4 titik pemantauan dinyatakan tercemar ringan. Dengan demikian didapati nilai IKA sebesar 58,57 yang mana menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 45,00.

3.6. *Impact / Dampak*

- **Keselamatan Masyarakat, Lingkungan yang Baik dan Sehat, serta Kelestarian Ekosistem**

Keselamatan masyarakat, lingkungan yang baik dan sehat, serta kelestarian ekosistem merupakan 3 bagian yang berkaitan karena ketiganya merupakan bagian dari indikator tercapainya tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari segala program yang dijalankan oleh DLH ialah terjaganya kualitas lingkungan dari segala macam bentuk pencemaran sehingga terciptanya keselamatan dari masyarakat serta terciptanya lingkungan yang kondusif dan bebas dari pencemaran. Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah berhasil menjalankan berbagai program demi terjaganya lingkungan serta masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan. Pada tahun-tahun sebelumnya banyak sekali aduan dari masyarakat terkait tercemarnya DAS Bengawan Solo yang digunakan warga baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk irigasi sawah serta kebun dan ternak. Namun setelah berbagai program dijalankan seperti pengaplikasian IPAL, pengawasan terhadap industri penghasil limbah, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk pengembalian kualitas air sungai kini hampir tidak ada aduan dari masyarakat terhadap DLH.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil melakukan program ataupun upaya dalam mengatasi pencemaran limbah industri sehingga terciptanya keamanan serta keselamatan masyarakat.

3.7. *Diskusi Temuan Utama Penelitian*

Peneliti menemukan hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam mitigasi pencemaran limbah industri yaitu kurangnya sumber daya manusia serta anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Boyolali juga masih terbilang pasif dan kurangnya kesadaran potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri yang menghasilkan limbah yang berdampak langsung kepada tempat tinggalnya sehingga menyikapi hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

berupaya untuk meningkatkan kapasitas relawan serta lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan sehingga dapat juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas relawan serta LSM di Kabupaten Boyolali dilakukan terhadap relawan peduli lingkungan sejak usia dini yaitu usia sekolah mulai dari pelajar SD, SMP dan SMA sederajat. Perwakilan dari setiap sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat di wilayah Kabupaten Boyolali akan diberikan sosialisasi, simulasi dan demonstrasi terkait pemahaman pentingnya kelestarian lingkungan hidup, dampak pencemaran dan hal apa yang perlu dilakukan apabila pencemaran terjadi. Sehingga hal yang berkaitan dengan pencemaran serta pengurangan risiko bencana dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif telah ditanamkan sejak usia dini

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sudah optimal serta secara keseluruhan sudah sangat baik. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam upaya Mitigasi Pencemaran Lingkungan. Namun masih ditemukan beberapa Hambatan seperti sarana dan prasarana yang kurang lengkap, kurangnya personil serta anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan berbagai program diantaranya: Monitoring Limbah Cair dari Kegiatan / Usaha, Instalasi dan Pengoperasian IPAL Biogas Ternak, Pengembangan Kampung Iklim, Pembangunan Sumur Resapan Biopori, Penyediaan Sarana Pengaduan Kasus Lingkungan, Pelibatan Komunitas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Jejaring Kerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mitigasi pencemaran lingkungan merupakan kewajiban semua pihak dan perlu adanya kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya sehingga dampak yang terjadi dapat lebih diminimalisir. Oleh sebab itu, selain peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup perlu juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Ngemplak di 2 desa yaitu Desa Sawahan dan Desa Gagaksipat di Kabupaten Boyolali sehingga belum menyeluruh secara maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Dalam Mitigasi Pencemaran Limbah Industri untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Husin Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Mahsun, Mohamad. 2010. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT . Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Neuman, W. Laurance. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*. United State of America: Allyn and Bucon.
- R.M Gatot P. Soemartono,. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revormasi Birokrasi dan Manajemen PNS)*. Bandung: RHEFIKA ADITMA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2015. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

